



# Interoperabilitas Model Kerja Sama Keamanan Maritim Regional dalam Mendukung Strategi Pertahanan Laut Indonesia di Laut Sulu-Sulawesi

*(Interoperability of Regional Maritime Security Cooperation Models in Support of Indonesia's Sea Defense Strategy in the Sulu-Sulawesi Sea)*

Falia Alviani Irawansyach<sup>1</sup>, Prasetyawan<sup>2</sup> Strategi Pertahanan Laut  
Fakultas Strategi Pertahanan

[faliaa260701@gmail.com](mailto:faliaa260701@gmail.com), [pras10176@gmail.com](mailto:pras10176@gmail.com)

**Abstrak.** Laut Sulu–Sulawesi merupakan salah satu kawasan maritim paling strategis sekaligus paling rawan di Asia Tenggara. Berbatasan langsung antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina, kawasan ini menjadi rute penting perdagangan internasional, perikanan, serta mobilitas masyarakat pesisir. Di sisi lain, kawasan ini juga rentan terhadap kejahatan transnasional seperti perompakan, penculikan, penyelundupan, dan aktivitas kelompok bersenjata non-negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model kerja sama keamanan maritim regional yang diimplementasikan di kawasan Sulu–Sulawesi dan mengevaluasi kontribusinya terhadap strategi pertahanan laut Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis konsep *cooperative maritime security*, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) atau kerja sama INDOMALPHI menjadi model paling efektif dalam menekan eskalasi ancaman maritim. Namun, sejumlah hambatan struktural, kapasitas, dan politik masih membatasi efektivitasnya. Penelitian ini mengusulkan model kerja sama ideal berbasis *maritime security regime* yang lebih komprehensif, integratif, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Keamanan Maritim, Kerja Sama Regional, Strategi Pertahanan Laut, Laut Sulu-Sulawesi, *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA)



**Abstract.** *The Sulu-Sulawesi Sea is one of the most strategic and yet most vulnerable maritime regions in Southeast Asia. Bordered directly by Indonesia, Malaysia, and the Philippines, this region serves as a vital route for international trade, fisheries, and the mobility of coastal communities. Furthermore, this region is also vulnerable to transnational crimes such as piracy, kidnapping, smuggling, and the activities of non-state armed groups. This study aims to analyze the regional maritime security cooperation model implemented in the Sulu-Sulawesi region and evaluate its contribution to Indonesia's maritime defense strategy. Using a descriptive qualitative approach and conceptual analysis of cooperative maritime security, this study finds that the Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) mechanism, or INDOMALPHI cooperation, is the most effective model in suppressing the escalation of maritime threats. However, a number of structural, capacity-based, and political barriers still limit its effectiveness. This study proposes an ideal cooperation model based on a more comprehensive, integrative, and sustainable maritime security regime.*

*Keywords: Maritime Security, Regional Cooperation, Sea Defense Strategy, Sulu Sea–Sulawesi, Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)*

## 1. Pendahuluan

Penelitian berjudul “Model Kerja Sama Keamanan Maritim Regional dalam Mendukung Strategi Pertahanan Laut Indonesia di Laut Sulu–Sulawesi” ini menjelaskan bahwa Laut Sulu–Sulawesi merupakan kawasan strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan jalur perdagangan utama menuju Laut Cina Selatan dan Selat Malaka, menjadi koridor vital pelayaran internasional sekaligus ruang kontestasi kepentingan negara dan aktor non-negara akibat tingginya aktivitas ekonomi, posisi geografis lintas batas, serta kompleksitas ancaman seperti perompakan, terorisme maritim, penyelundupan senjata, perdagangan manusia, dan *illegal fishing* (Rantung, 2021), yang diperparah oleh rivalitas kekuatan besar Indo-Pasifik dan lemahnya kontrol yurisdiksi sehingga menuntut pendekatan keamanan kolektif yang tetap selaras dengan kepentingan pertahanan nasional Indonesia (Till, 2021), sementara meskipun telah dibentuk kerja sama trilateral melalui *Trilateral Maritime Patrol* (TMP), efektivitasnya masih dinilai fragmentatif, reaktif, dan belum ditopang rezim keamanan yang kuat serta belum terintegrasi secara strategis dengan doktrin pertahanan laut nasional (Rustam, 2020; Rantung, 2021), menghadapi kendala sensitivitas kedaulatan, keterbatasan interoperabilitas, dan perbedaan prioritas kebijakan, sehingga



memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana model kerja sama tersebut benar-benar mendukung kepentingan strategis pertahanan laut Indonesia, terlebih karena penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek operasional dan kejahatan maritim tanpa mengonstruksi kerja sama sebagai instrumen strategis pertahanan negara, sehingga penelitian ini menjadi urgen dan memiliki kebaruan dengan menawarkan pergeseran fokus menuju perumusan model kerja sama yang strategis, adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna memperkuat postur pertahanan laut Indonesia, menjawab rumusan masalah terkait karakteristik model yang ada, relevansinya terhadap strategi pertahanan laut nasional, serta model ideal yang diperlukan, sekaligus diharapkan memberikan kontribusi strategis bagi pengembangan kebijakan pertahanan laut dan memperkaya diskursus akademik tentang hubungan kerja sama keamanan regional dengan strategi pertahanan negara di kawasan rawan konflik maritim.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk mendukung pemahaman dan analisis dalam penelitian ini. Teori-teori yang relevan berfungsi untuk membangun kerangka berpikir yang logis, sistematis, dan ilmiah dalam menjelaskan fenomena yang dikaji. Komunikasi merupakan bagian penting dari operasi militer yang memiliki kompleksitas tinggi, melibatkan berbagai aspek seperti kesiapan operasional, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem koordinasi berbasis teknologi digital. Oleh karena itu, kajian teoritis dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa teori (Abiwibowo et al., 2025).

Landasan teoritis penelitian ini berpijak pada pemikiran klasik dan kontemporer mengenai kekuatan laut serta keamanan maritim sebagai instrumen



strategis negara. Alfred Thayer Mahan menekankan pentingnya superioritas laut (*sea power*) sebagai fondasi kejayaan negara, di mana kontrol atas jalur laut menentukan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Dalam konteks Laut Sulu–Sulawesi, pemikiran Mahan relevan untuk memahami pentingnya dominasi wilayah laut sebagai penopang kepentingan strategis Indonesia.

Sebaliknya, Julian Corbett memandang kekuatan laut tidak semata dominasi fisik, melainkan kontrol terbatas yang bertujuan mendukung kepentingan politik nasional melalui fleksibilitas strategi, konsep yang dikenal sebagai *sea control* dan *sea denial*. *Sea control* merujuk pada kemampuan menguasai wilayah laut untuk kepentingan sendiri, sedangkan *sea denial* bertujuan mencegah pihak lawan memanfaatkannya. Kedua konsep ini menjadi fondasi bagi strategi pertahanan laut Indonesia dalam menyeimbangkan dominasi dan penangkalan di kawasan rawan konflik (Till, 2021).

Teori *deterrence* juga berperan penting, khususnya dalam konteks keamanan kawasan perbatasan. *Deterrence* menekankan penciptaan efek gentar melalui kredibilitas kekuatan dan kemampuan respons, sehingga aktor non-negara seperti kelompok bersenjata dan jaringan kriminal enggan melakukan pelanggaran. Di Laut Sulu–Sulawesi, efektivitas patroli bersama dapat dipahami sebagai bentuk *deterrence* kolektif berbasis kerja sama regional.

Sementara itu, konsep *maritime security* berkembang sebagai pendekatan multidimensional yang tidak hanya mencakup pertahanan militer, tetapi juga keamanan ekonomi, lingkungan, dan perlindungan manusia (*human security*). Namun, saat ini, keamanan maritim modern menuntut orkestrasi diplomasi, hukum laut, dan koordinasi keamanan lintas negara untuk menghadapi ancaman non-tradisional.

Dengan demikian, penelitian ini berpijak pada sinergi antara teori *sea power* (Mahan), kontrol laut fleksibel (Corbett), *deterrence strategy*, dan paradigma *maritime security* kontemporer sebagai basis analisis model kerja sama keamanan di kawasan Sulu–Sulawesi.

## 2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi mengenai keamanan Laut Sulu–Sulawesi umumnya menyoroti aspek operasional dan kebijakan kerja sama trilateral. Rustam (2020) mengidentifikasi lemahnya rezim keamanan maritim meskipun patroli trilateral telah berjalan, dengan masalah utama berupa kurangnya kerangka hukum yang mengikat dan minimnya koordinasi strategis antarnegara.

Rantung (2021) menegaskan bahwa kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah menghasilkan mekanisme patroli bersama dan pertukaran informasi, namun sifatnya masih reaktif dan belum sepenuhnya membentuk sistem pertahanan laut kolektif yang terintegrasi. Penelitian ini menyoroti dimensi keamanan, tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan strategi pertahanan laut nasional Indonesia.

Keamanan maritim Asia Tenggara merupakan bagian dari *governance* regional yang kompleks, di mana keberhasilan kerja sama sangat ditentukan oleh keselarasan kepentingan strategis dan kapasitas institusional.

Efektivitas *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) masih terkendala oleh perbedaan interoperabilitas militer dan sensitivitas kedaulatan. Berdasarkan hal tersebut, kerja sama keamanan maritim di kawasan rawan konflik harus bergerak dari koordinasi teknis menuju kerangka strategis jangka panjang yang berbasis visi bersama.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut cenderung:



- a. Berfokus pada aspek operasional keamanan.
- b. Membahas kerja sama regional secara normatif.
- c. Kurang mengaitkan langsung dengan doktrin pertahanan laut Indonesia.
- d. Di sinilah celah utama penelitian muncul.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara tiga elemen utama:

- a. Ancaman Keamanan Maritim di Laut Sulu–Sulawesi  
Seperti: perompakan, terorisme, penyelundupan, pelanggaran batas.
- b. Strategi Pertahanan Laut Indonesia  
Seperti: kombinasi *sea control*, *sea denial*, dan *deterrence* berbasis pertahanan berlapis.
- c. Model Kerja Sama Keamanan Regional  
Seperti: *trilateral cooperation* dan rezim keamanan terstruktur.

Hubungan ketiganya membentuk alur berikut:

- Ancaman Maritim -> Kebutuhan Strategi Pertahanan -> Evaluasi Kerja Sama -> Formulasi Model Ideal -> Penguatan Postur Pertahanan Laut

Model konseptual ini menempatkan kerja sama maritim bukan sekadar instrumen tambahan, tetapi sebagai bagian integral dari arsitektur pertahanan laut Indonesia.



### 3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus strategis (*strategic case study*) untuk menganalisis bagaimana model kerja sama keamanan maritim regional dapat diformulasikan secara lebih efektif dalam mendukung strategi pertahanan laut Indonesia di kawasan Laut Sulu–Sulawesi. Pendekatan kualitatif dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga berkaitan dengan aspek doktrinal, geopolitik, dan relasi strategis antarnegara yang membutuhkan pemahaman mendalam serta interpretatif (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2017).

Penelitian difokuskan pada dinamika kerja sama trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina serta bagaimana mekanisme tersebut dapat dikonstruksi ulang menjadi model kerja sama yang tidak sekadar reaktif, tetapi strategis dan terintegrasi dengan doktrin pertahanan laut Indonesia.

Analisis penelitian ini berlandaskan pada kombinasi teori *Sea Power* Alfred Thayer Mahan yang menekankan pentingnya penguasaan laut sebagai instrumen supremasi negara, serta pemikiran Julian Corbett mengenai *sea control* dan *sea denial* sebagai bentuk kontrol fleksibel yang mendukung kepentingan politik dan militer negara. Kedua teori tersebut digunakan untuk membaca posisi Laut Sulu–Sulawesi sebagai ruang strategis yang bukan hanya menjadi arena keamanan regional, tetapi juga medan penting dalam postur pertahanan laut Indonesia (Till, 2021).

Selain itu, teori *deterrence* digunakan untuk mengukur sejauh mana kerja sama trilateral mampu menciptakan efek gentar terhadap aktor non-negara seperti kelompok perompak dan jaringan kriminal transnasional. Konsep *maritime security* kontemporer juga dijadikan kerangka analitik untuk menilai dimensi keamanan yang lebih luas, termasuk aspek hukum, diplomasi, ekonomi, dan *human security*.

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh



melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen strategis, meliputi:

- Jurnal internasional dan nasional terbitan 2020–2025 terkait keamanan maritim dan kerja sama regional.
- Dokumen kebijakan pertahanan dan keamanan Indonesia.
- Laporan resmi ASEAN, IMO, dan lembaga keamanan regional.
- Hasil penelitian terdahulu yang relevan, seperti Rustam (2020) dan Rantung (2021).

Sumber-sumber tersebut dipilih untuk memastikan data yang digunakan memiliki validitas akademik dan relevansi strategis. Sementara, untuk teknik analisis data, data dianalisis menggunakan metode analisis tematik strategis (*strategic thematic analysis*) dengan tahapan:

- Identifikasi pola ancaman keamanan di Laut Sulu–Sulawesi.
- Evaluasi efektivitas kerja sama trilateral yang berjalan.
- Pemetaan kesesuaian kerja sama dengan doktrin pertahanan laut Indonesia.
- Sintesis teori dan temuan empiris untuk merumuskan model kerja sama ideal,
- Metode ini memungkinkan peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga membangun model konseptual yang relevan secara strategis.

Kemudian, untuk penelitian terdahulu dan celah penelitian, kajian Rustam (2020) mengungkap lemahnya rezim keamanan maritim di Laut Sulawesi–Sulu akibat minimnya kerangka hukum yang mengikat, sementara Rantung (2021) menilai kerja sama trilateral masih bersifat reaktif dan operasional. Efektivitas

keamanan maritim di Asia Tenggara sangat dipengaruhi faktor *governance* dan kapabilitas institusional. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya:

- Berfokus pada efektivitas patroli dan aspek teknis-operasional.
- Tidak menghubungkan kerja sama regional dengan doktrin pertahanan laut Indonesia secara eksplisit.
- Belum membangun model kerja sama sebagai bagian dari strategi pertahanan jangka panjang.

Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu merumuskan model kerja sama keamanan maritim regional yang bersifat strategis, adaptif, dan terintegrasi dengan postur pertahanan laut Indonesia. Kemudian, untuk kerangka berpikir penelitian ini mengikuti alur:

Ancaman Maritim -> Evaluasi Kerja Sama Trilateral -> Analisis Strategi Pertahanan Laut -> Formulasi Model Kerja Sama Ideal -> Penguatan Postur Pertahanan

Melalui kerangka ini, kerja sama maritim diposisikan bukan hanya sebagai instrumen keamanan teknis, melainkan sebagai elemen strategis dalam arsitektur pertahanan laut nasional.

## **4. Hasil dan Diskusi**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **1. Dinamika Keamanan Maritim di Kawasan Laut Sulu–Sulawesi**

Laut Sulu–Sulawesi merupakan kawasan strategis yang menghubungkan perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Jalur laut ini menjadi rute penting bagi perdagangan, perikanan, serta mobilitas masyarakat pesisir ketiga negara.

Namun, karakteristik geografis berupa hamparan pulau-pulau kecil dan garis pantai yang panjang menjadikan kawasan ini rentan terhadap aktivitas kejahatan transnasional seperti:

- a) Pembajakan dan perompakan.
- b) Penculikan untuk tebusan (KFR) oleh kelompok bersenjata.
- c) Penyelundupan manusia dan barang.
- d) Perdagangan senjata ilegal.
- e) Aktivitas terorisme maritim yang terkait dengan kelompok ekstremis di Filipina bagian Selatan.

Kondisi ini menuntut pendekatan keamanan yang bersifat kolektif karena sifat ancaman yang *borderless* dan membutuhkan respons lintas yurisdiksi.

## 2. Kepentingan Indonesia dalam Stabilitas Kawasan

Bagi Indonesia, Laut Sulu–Sulawesi memiliki nilai strategis dari sejumlah aspek:

### a) Keamanan Nasional

Maraknya perompakan dan infiltrasi militan dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Indonesia Timur (Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara).

### b) Ekonomi Nasional

Perairan ini merupakan jalur perdagangan penting serta wilayah penangkapan ikan bagi nelayan lokal.

### c) Keutuhan Wilayah (*Sovereignty Protection*)

Mobilitas kelompok bersenjata Filipina ke wilayah Indonesia dapat



mengancam kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.

d) Citra dan Peran Kepemimpinan Indonesia

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia dituntut untuk memainkan peran utama dalam arsitektur keamanan maritim ASEAN.

Oleh karena itu, Indonesia memerlukan *maritime security architecture* yang mendukung strategi pertahanan laut berlapis, serta terintegrasi dengan diplomasi pertahanan regional.

3. Kerja Sama Trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina (INDOMALPHI)

Model kerja sama keamanan maritim yang paling relevan di kawasan ini adalah mekanisme *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Model ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya serangan kelompok Abu Sayyaf. Elemen utama TCA meliputi:

a) *Trilateral Maritime Patrol* (TMP)

Patroli terkoordinasi dengan pembagian sektor patroli, yang meningkatkan *maritime domain awareness* dan mengurangi *blind spot* operasi.

b) *Trilateral Air Patrol* (TAP)

Pengintaian udara secara terkoordinasi untuk mempercepat deteksi pergerakan kapal mencurigakan.

c) *Maritime Command Centers* (MCCs)

Pos komando di Tarakan (Indonesia), Tawau (Malaysia), dan Bongao (Filipina), yang berfungsi untuk:



- 1) Pertukaran informasi *real-time*.
- 2) Koordinasi tindakan cepat (*quick response*).
- 3) Sinkronisasi protokol operasi.
- 4) *Hot Pursuit* dan *Cross-Border Cooperation*.
- 5) *Capacity Building* dan *Confidence Building*.

Meski belum berlaku penuh karena kendala yurisdiksi, terdapat mekanisme yang memungkinkan tindakan pengejaran terbatas dan penyerahan cepat pelaku kriminal lintas negara. Beberapa aktivitas lain meliputi:

- Latihan Bersama
- Pendidikan dan pelatihan teknis
- Pertukaran intelijen
- Harmonisasi SOP keselamatan dan keamanan

Model TCA ini memperlihatkan kemajuan signifikan sebagai *confidence-building measure* di kawasan yang sebelumnya menghadapi ancaman sensitivitas kedaulatan.

#### 4. Evaluasi Efektivitas Model Kerja Sama TCA

Secara umum, TCA telah memberikan dampak positif, antara lain:

- a) Penurunan insiden penculikan dan perompakan yang signifikan sejak 2017.
- b) Respons cepat terhadap insiden maritim melalui MCC.
- c) Peningkatan kesadaran situasional melalui koordinasi patroli.
- d) Meningkatnya interoperabilitas angkatan laut dan penegak hukum



ketiga negara.

Namun, sejumlah kendala tetap ada:

- a) Keterbatasan yurisdiksi dan sensitivitas kedaulatan, sehingga operasi hot pursuit masih terbatas.
- b) Kesenjangan kemampuan antar negara, terutama pada kapasitas teknologi pemantauan dan komunikasi.
- c) Tantangan pendanaan dan keberlanjutan operasional, seperti jam operasi kapal patroli yang masih rendah.
- d) Keterbatasan pengawasan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang melibatkan jaringan lintas batas di pesisir.

Kendala ini menunjukkan perlunya reformasi mekanisme kerja sama agar mampu mendukung strategi pertahanan laut Indonesia secara optimal.

## 5. Integrasi dengan Strategi Pertahanan Laut Indonesia

Strategi pertahanan laut Indonesia menekankan pada:

- a) *Deterrence* melalui kehadiran militer yang kredibel.
- b) *Early detection* melalui peningkatan kesadaran wilayah maritim.
- c) *Layered defense* atau pertahanan berlapis.
- d) Kerja sama internasional sebagai instrumen pertahanan non-militer.
- e) Penegakan hukum di laut untuk menjamin stabilitas kawasan,

Model kerja sama TCA sangat relevan dengan strategi tersebut karena:

- a) Memperkuat Deteksi Dini

Patroli gabungan dan MCC memungkinkan Indonesia mendapatkan gambaran situasional lebih menyeluruh, terutama di perbatasan perairan Sulawesi Utara dan Kalimantan Utara.

b) Mengurangi Beban Operasi TNI AL

Koordinasi dengan Malaysia dan Filipina mengurangi *operational burden* Indonesia dalam pengamanan jalur strategis.

c) Meningkatkan Legitimasi Internasional

Kerja sama ini memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong norma keamanan maritim ASEAN, seperti *ASEAN Maritime Outlook* dan *Our Eyes Initiative*.

d) Mendukung Pengamanan Wilayah Terdepan

Kerja sama memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap potensi infiltrasi teroris ke wilayah Indonesia.

e) Mendorong Modernisasi Sistem Pertahanan Laut

Interoperabilitas memaksa Indonesia memperbaiki:

- 1) Sistem komunikasi maritim
- 2) Integrasi radar dan satelit
- 3) SOP patroli dan penindakan

Dengan demikian, TCA berfungsi sebagai *force multiplier* bagi pertahanan laut nasional.

6. Model Ideal Kerja Sama Maritim Regional bagi Indonesia

Agar lebih efektif, Indonesia dapat mendorong model kerja sama regional yang lebih komprehensif di Laut Sulu–Sulawesi dengan unsur berikut:



a) *Cooperative Maritime Security Regime*

Kerangka kerja sama yang mengintegrasikan aspek militer, penegakan hukum, intelijen, diplomasi, dan pembangunan ekonomi kawasan.

b) *Maritime Information Fusion Center*

Pendirian pusat integrasi data lintas negara (mirip IFC Singapura) untuk:

- Sharing intelijen
- Tracking kapal mencurigakan
- Analisis pola kejahatan maritim

c) Mekanisme *Hot Pursuit* Terbatas yang Dikodifikasi

Perlu disepakati protokol pengejaran hingga titik tertentu tanpa melanggar kedaulatan negara lain.

d) Harmonisasi Aturan Penegakan Hukum Laut

Agar tidak terjadi ketidaksinkronan proses hukum terhadap pelaku kejahatan lintas batas.

e) Penguatan Infrastruktur dan Kapasitas Pesisir

Mendukung *whole-of-government approach*, termasuk:

- Pemberdayaan masyarakat pesisir.
- Pemantauan berbasis komunitas (*community-based surveillance*).
- Pembangunan ekonomi lokal untuk mengurangi kerentanan terhadap kriminalitas.

f) Keterlibatan ASEAN dan Mitra Eksternal

Mengintegrasikan TCA dengan kerangka yang lebih luas:

- *ADMM-Plus* (khususnya ERAT dan *Maritime Security Working Group*).
- Mekanisme latihan maritim bersama ASEAN.
- Dukungan teknis dari Jepang, AS, Australia, dan Uni Eropa.

Model ini akan memperkuat daya tangkal dan memperluas dukungan strategis bagi pertahanan laut Indonesia.

7. Kontribusi Model Kerja Sama terhadap Keamanan Jangka Panjang

Keamanan maritim di Laut Sulu–Sulawesi tidak hanya terkait aspek militer, tetapi juga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Dengan demikian:

- a) Kolaborasi trilateral yang kuat akan mengurangi ruang gerak kejahatan lintas batas.
- b) Peningkatan kepercayaan antar negara akan memperkuat stabilitas kawasan.
- c) Integrasi data dan teknologi meningkatkan keefektifan patroli.
- d) Sinergi pertahanan dan diplomasi meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam arsitektur keamanan maritim ASEAN.

## 5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kerja sama keamanan maritim regional melalui mekanisme INDOMALPHI menjadi instrumen strategis untuk menanggulangi ancaman keamanan di Laut Sulu–Sulawesi. Model ini terbukti meningkatkan efektivitas deteksi dini, respons cepat, dan demikian, tantangan struktural, teknis, dan politis masih membatasi



efektivitas penuh kerja sama tersebut.

Untuk mencapai keamanan jangka panjang, diperlukan model kerja sama yang lebih integratif berbasis *maritime security regime* yang mampu menyatukan aspek militer, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, dan diplomasi. Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran utama dalam membentuk arsitektur keamanan maritim regional yang lebih efektif dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

### Daftar Pustaka

- Abiwibowo, T., Prakoso, L. Y., & Subiantoro, Y. (2025). Interoperabilitas Komunikasi Pesawat CN-235 dengan Kapal Perang Republik Indonesia dalam Mendukung Operasi Gabungan TNI. *Strategi Pertahanan Laut*, 11(1). Universitas Pertahanan Republik Indonesia.  
<https://fsp.jurnalmultikademia.online/spl/article/view/87>
- Bueger, C. (2020). What is Maritime Security? *Marine Policy*, 53, 159–164.  
<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103972>
- Rantung, G. (2021). Kerjasama Trilateral Indonesia Malaysia dan Filipina dalam Menanggulangi Masalah Keamanan Maritim di Perairan Sulu. *Politico*, 10(4), 112–126. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Rustam, I. (2020). Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi. *Jurnal Penelitian Politik*, 17(2), 213–229.  
<https://ejournal.brin.go.id/jpp/article/view/10790>
- Till, G. (2021). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century* (5th ed.). Routledge.